



EVALUASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL KOTA PADANG PANJANG (PENDEKATAN *EXPORT BASE MODEL*)

Eliza

Dosen Fakultas Ekonomi UMMY

Email: do.elizappn@yahoo.co.id

Abstract

Economic development is an essential factor to development in the country because development was not just about economy phenomena but include material and financial problem in the life many people. So that implementation of suitable policies succeed to achieve many object and purpose of effective development need good planning and evaluation. For example Padang Panjang City, location quotient showed that basic sector is electricity and transportation. base on the result the goverment have to take a policy that actually develop the basic sector until give a big value added to income of the city non basic sector must be develop together with basic sector because connected to economic growth .

Keywords : *Economic development, location quotient, basic sector electricity*

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi adalah satu komponen yang esensial dari pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi, dengan pengertian yang mendasar pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang banyak (Michael P Todaro, 2000).

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia tengah menghadapi berbagai fenomena pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah dimana pemerataan dan pertumbuhan merupakan dua aspek yang diinginkan bisa berjalan seiring dengan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kebijakan nasional dalam melaksanakan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai Trilogi Pembangunan, yaitu: (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan itu saling berkaitan dan saling memperkuat atau mendukung satu sama lain (Rustian Kamaluddin, 1991)

Secara konseptual penekanan arah pembangunan terletak pada aspek pemerataan seperti yang tercermin dalam Trilogi Pembangunan, namun secara operasional konsep tersebut perlu dibicarakan lagi, terutama apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah, dimana porsi anggaran pembangunan sektoral yang



berorientasi pada pertumbuhan jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi pembangunan daerah atau wilayah yang lebih berorientasi pada pemerataan (Syafrizal, 2000). Pada masa orde baru model pembangunan yang dipilih oleh pemerintah adalah model pembangunan yang meletakkan pemerintah pusat sebagai perencana dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dari program yang dirancang oleh pemerintah pusat. Akibatnya pembangunan yang terjadi bersifat sentralistik dan memiliki kelemahan, diantaranya adalah kurang sesuainya pembangunan yang disusun bagi daerah dengan kebutuhan, aspirasi dan karakteristik budaya setempat sehingga tidak mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Keadaan ini juga kurang merangsang kreatifitas pemerintah daerah dan aparatnya dalam upaya mencari ide-ide dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung perkembangan daerahnya.

Desentralisasi yang berlangsung sekarang ini, yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No. 25/1999 pasti punya pengaruh terhadap aspek-aspek keadilan, atau pemerataan dan efisiensi. Dari segi pemerataan kesenjangan pendapatan antar daerah dapat diperkecil dengan meratakan ketersediaan sumber dana antar pemerintah daerah. Sementara itu dari segi efisiensi diharapkan bahwa proses desentralisasi akan mengalihkan sumber keuangan untuk pembiayaan pelayanan publik yang semula disesuaikan dengan kepentingan pusat menjadi lebih



mengutamakan kepentingan daerah (Raksaka Mahi, 2000).

Dalam era otonomi sekarang ini tentunya setiap daerah akan terdorong untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dari daerah lain karena masing-masing daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi daerahnya, akibatnya persaingan antar daerah dalam bidang ekonomi juga akan semakin meningkat. Namun, bertitik tolak dari keadaan ini daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri dimana selama ini hal tersebut tidak dapat dilakukan, dengan kata lain daerah harus mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Tulus Tambunan, 2001).

Dalam pengembangan daerahnya Kota Padang Panjang menitikberatkan dalam sektor jasa sebagai sektor yang potensial berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkannya. Agar pelaksanaan suatu kebijaksanaan berhasil mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efektif, maka diperlukan perencanaan yang baik dan adanya suatu evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat diambil langkah-langkah dalam perencanaan selanjutnya. Mengingat potensi utama pembangunan daerah kelihatannya berada pada sektor jasa-jasa, maka pengembangan daerah merupakan strategi yang diperkirakan akan dapat meningkatkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan (Syafrizal, 1988).

Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan sektor-sektor apa saja yang dapat dijadikan sebagai sektor basis dalam perekonomian Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengukur besarnya dampak dari sektor basis terhadap perkembangan PDRB Kota Padang Panjang.
3. Untuk memperkirakan perkembangan perekonomian dan perkembangan sektor-sektor basis Kota Padang Panjang.

Manfaat Penelitian

1. Dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama Ekonomi Perencanaan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
2. Berguna bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan pembandingan terhadap evaluasi daerah pembangunan Kota Padang Panjang yang telah di buat oleh Pemda Kota Padang Panjang.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijaksanaan dalam penyusunan rencana, kebijaksanaan serta strategi pembangunan Kota Padang Panjang di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan

aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan dengan cara, secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep-konsep strategi bagi pemecahan masalah dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan (Syahroni, 2002).

Arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya pemecahan masalah besarnya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta keberhasilan di berbagai sektor. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan daerah dengan tujuan menyerasikan dan memperkecil perbedaan tingkat laju pertumbuhan antar daerah, serta seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Paradigma perencanaan pembangunan daerah yang terdesentralisasi memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan semua pelaku di daerah untuk berpartisipasi membangun daerahnya sebagai subyek pembangunan, bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Masyarakat daerah merencanakan sendiri pembangunan bagi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya berdasarkan

karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya daerah yang tersedia (Syahroni, 2002).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal atau daerah. Sesuai dengan UUD 1945 dan semangat reformasi yang berkembang, pembangunan daerah kini direncanakan melalui prinsip-prinsip otonomi daerah, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut.

Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui persetujuan DPR telah menetapkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran yang sangat drastis, yaitu dari yang





sebelumnya serba sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dalam situasi demikian, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing secara optimal (Deddy Supriady B dan Dadang S, 2004).

Menurut Mardiasmo (2000), pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, dimana kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada daerah merupakan langkah strategi yang diambil oleh pemerintah dalam hal: *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal seperti kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi dan memperkuat basis perekonomian daerah.

Untuk itu strategi pembangunan ekonomi daerah harus mengalami beberapa perubahan penting agar sesuai dengan keadaan saat ini. Menurut Syafrizal (2000) dalam Maiza Oktalinda (2004), menyatakan strategi baru tersebut tetap searah dengan titik berat pembangunan nasional maupun daerah, yakni dalam bidang ekonomi demi mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan sekaligus untuk

mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Adapun strategi baru untuk menyikapi pembangunan ekonomi dalam era otonomi yang merujuk pada kebijaksanaan pembangunan sektor-sektor ekonomi antara lain:

1. Menjalankan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berdasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif yaitu mengkombinasikan unsur kreatifitas, teknologi dan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing yang tinggi.
2. Pengembangan komoditi unggulan yang diharapkan melalui kebijaksanaan ini masing-masing daerah dapat mengembangkan produk-produk utama yang mempunyai daya saing yang tinggi karena didukung oleh keuntungan komparatif daerah yang bersangkutan.
3. Peningkatan kemampuan teknologi daerah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang telah ada serta merangsang munculnya penemuan produk baru.

Pembangunan daerah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan dan karakteristik khusus dari setiap daerah. Pembangunan daerah juga harus meningkatkan partisipasi lokal sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan pendapatan perkapita masyarakat lokal. Pendapatan perkapita penduduk akan menambah daya tarik daerah tersebut untuk menarik investor baru yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan yang tinggi merupakan kondisi yang utama demi kelangsungan ekonomi, karena penduduk bertambah terus, sehingga kebutuhan ekonomi juga bertambah maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto setiap tahunnya. (Tulus Tambunan, 2001).

Menurut Robinson Tarigan, (2004), teori pertumbuhan ekonomi regional adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan ini dapat diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pada teori pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor yang sangat diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan. Akan tetapi, pada teori pertumbuhan ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, migrasi dan lalu lintas modal.

Teori pertumbuhan ekonomi regional pada dasarnya menjelaskan kenapa suatu daerah dapat secara cepat berkembang, sedangkan yang lainnya kurang berkembang. Selanjutnya, teori ini membahas dua faktor-faktor utama yang

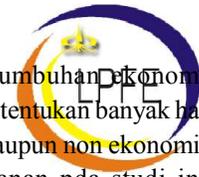
menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang ditentukan banyak hal baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Namun demikian tekanan pada studi ini adalah pada faktor ekonomi saja. Secara umum, teori ekonomi regional dapat dibagi atas empat kelompok diantaranya adalah 1) *Export Base model*, 2) *Classical Model*, 3) *Cummulative Causion Model*, 4) *Center Pheryphery Model*. Pengelompokan teori ini didasarkan atas asumsi yang berbeda.

Namun untuk pembahasan studi ini model yang dipakai adalah model yang pertama yaitu model *Export Base* yang nantinya akan menentukan sektor-sektor perekonomian apa saja di Kota Padang Panjang yang menjadi sektor unggulan bagi daerahnya.

3. Teori Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional

Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan adanya kebijakan pembangunan daerah yang salah satu tujuannya adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan pembangunan dan kemakmuran antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Besar kecilnya peranan pemerintah melalui kebijakan perekonomiannya akan bergantung pada sistem ekonomi negara yang bersangkutan, dimana kebijakan bertujuan untuk mendorong ekonomi setiap daerah agar daerah berkembang dapat meimbangi daerah yang maju sehingga diskualitas regional dapat dikurangi.

Teknik-teknik untuk mengevaluasi kebijakan regional dapat dibagi atas





evaluasi mikro dan makro. Analisa dalam evaluasi mikro adalah proyek-proyek pembangunan, biasanya evaluasi dilakukan terhadap proyek –proyek besar saja. Teknik analisa yang digunakan adalah *Cost Benefit Ratio* (CBR) yang didasarkan pada realisasi pelaksanaan proyek. Sedangkan, dalam evaluasi makro salah satu alat analisisnya adalah dengan menggunakan analisis dampak regional. Analisis dampak regional ini menggunakan model pertumbuhan ekonomi regional basis ekspor. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan nilai dampak suatu sektor bagi suatu daerah dengan nilai dampak sektor yang sama secara nasional.

Ide pokok dari teori ini menyatakan perbedaan sumber daya dan geografis dari suatu negara menyebabkan masing-masing daerah mempunyai keuntungan lokasi (keuntungan komparatif) terhadap beberapa sektor atau jenis kegiatan-kegiatan tersebut didorong pertumbuhannya maka akan dapat dijadikan sebagai leading bagi daerah yang bersangkutan.

4. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2000). Selanjutnya BPS menyebutkan bahwa PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah unit barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat memberikan gambaran tentang nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2000 yang dianggap sebagai harga konstan sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat juga digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PRDB atas dasar harga konstan 2000 dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

Dalam rangka perhitungan PDRB, selama ini BPS melakukan dengan empat pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Dengan metode pendekatan ini bermaksud menghitung net output (hasil bersih) barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi suatu daerah selama setahun. Barang dan jasa yang diproduksi ini dinilai pada harga produsen yaitu yang terjadi transaksi pertama, dimana di dalamnya belum untuk margin (biaya) perdagangan dan transportasi, harga produsen ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai (pendapatan) yang benar-benar diterima oleh produsen, sedangkan margin perdagangan dan transportasi tidak dimasukkan ke dalam harga ini, karena sudah ditempuh pada sektor perdagangan,

transportasi dan merupakan pendapatan pada sektor-sektor tersebut.

Penilaian barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto karena didalamnya termasuk biaya barang dan jasa yang terpakai dan dibeli dari sektor lain. Untuk menghindari perhitungan dua kali maka biaya barang dan jasa yang dibeli dari sektor ini dikeluarkan, sehingga diperoleh biaya produksi netto atau yang disebut juga dengan nilai tambah (*value added*). Nilai tambah ini merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari upah, gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan. Kalau nilai tambah ini ditambahkan dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto merupakan nilai tambah atas harga pasar.

Penjumlahan dari tambah bruto atas dasar harga pasar dari semua sektor ekonomi merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dan apabila dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung netto akan menjadi Produk Domestik Regional Bruto atas faktor biaya.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan secara ini dilakukan dengan cara menjumlahkan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan. Penjumlahan semua balas jasa faktor produksi yang dibayarkan oleh unit-unit yang beroperasi di wilayah itu merupakan nilai tambah netto atas dasar biaya faktor, sehingga penjumlahan semua nilai tambah ini akan menjadi Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan dengan cara ini bermaksud untuk menghitung pengeluaran regional dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, adapun pengeluaran-pengeluaran itu meliputi nilai konsumsi rumah tangga maupun yayasan sosial (*private non profit institution*), nilai pembentukan modal dan ekspor netto. Dengan menghitung komponen diatas dan menjumlahkan, maka akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

4. Pendekatan Secara Alokasi (*Allocation Method*)

Pendekatan secara alokasi ini adalah dengan jalan memakai indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan propensi ini terhadap pendapatan regional. Metode ini terpaksa dilakukan, bilamana data-data tentang sektor yang dihitung tersebut kurang.

5. Teori *Location Quotient*

Metode *Location Quotient* digunakan untuk melihat sektor potensial perekonomian regional. Nilai LQ diperoleh dengan membandingkan antara besarnya peranan suatu sektor/industri suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. (Robinson Taringan, 2004).

Dengan mengetahui sektor potensial regional, maka dapat dilakukan spesifikasi region menurut sektor perekonomiannya.





Apabila nilai Location Quotient suatu sektor lebih besar dari satu ($LQ_{ij} > 1$), maka region tersebut mempunyai potensi pada sektor yang bersangkutan dan apabila nilai $LQ < 1$, maka peranan sektor di daerah tersebut lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut secara nasional.

Analisa LQ juga berguna sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif yang dapat digunakan bagi sektor-sektor yang sudah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru berkembang tidak dapat menggunakan rumusan LQ karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Menentukan Sektor Basis

Untuk menentukan sektor basis dapat digunakan metode Location Quotient (LQ) dengan formulasi, sebagai berikut (Robinson Tarigan 2004):

$$Lq_{ij} = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n} \quad (1)$$

dimana:

LQ = Koefisien Lokasi

X_r = Nilai Produksi sektor i di region Kota Padang Panjang

RV_r = Total PDRB Kota Padang Panjang

X_n = Nilai produksi sektor i se-Sumatera Barat

RV_n = PDRB Sumatera Barat

Jika $LQ > 1$ maka tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama ditingkat nasional

Jika $LQ < 1$, maka tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional

2. Metode Analisa Dampak Regional Basis Ekspor

Analisa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijaksanaan pembangunan daerah terhadap sektor basis dalam perekonomian daerah adalah model pertumbuhan basis ekspor. Model ini menganggap bahwa pertumbuhan sektor basis akan dapat mendorong pertumbuhan suatu daerah secara keseluruhan dengan formula sebagai berikut (Richardson, 1978 dalam Maiza Oktolinda, 2004):

$$Y = S + B \quad (2)$$

dimana:

Y = regional income (pendapatan regional)

B = sektor basis

S = sektor non basis

Persamaan (2) adalah total pendapatan suatu daerah yang merupakan penjumlahan dari beberapa sektor ekonomi dan dalam persamaan diatas dikelompokkan atas dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Sektor non basis merupakan fungsi yang stabil dari total pendapatan:

$$S = sY \quad (3)$$

dimana:

s = marginal propensity to save

S = sektor non basis

Y = regional income

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan membutuhkan



peningkatan penyediaan barang-barang dan jasa-jasa.

Sedangkan hipotesis dari model basis ekspor adalah pendapatan yang merupakan suatu penggandaan dari pada sektor basis dengan formulasi, sebagai berikut:

$$Y = k B \quad (4)$$

dimana:

$$k = \frac{1}{(1-s)} \quad (5)$$

Substitusikan persamaan (5) ke (4) :

$$Y = \frac{1}{(1-s)} B \quad (6)$$

dimana: k = multiplier = koefisien dampak
Kemudian persamaan yang akan digunakan adalah persamaan yang akan menggunakan intercept:

$$S = s_1 + s_2 Y \quad (7)$$

Untuk mendapatkan persamaan sektor basis yang menggunakan intercept, substitusikan persamaan (7) kedalam persamaan (2):

$$Y = B + s_1 + s_2 Y$$

$$Y = s_2 Y + s_1 + B$$

$$Y (1-s_2) = s_1 + B$$

$$Y = \frac{s_1}{(1-s_2)} + \frac{1}{(1-s_2)} B \quad (8)$$

Persamaan (8) dapat disederhanakan menjadi:

$$Y = \alpha + \beta B \quad (9)$$

atau:

$$\alpha = \frac{s_1}{(1-s_2)}$$

$$\beta = \frac{1}{(1-s_2)}$$

β = nilai tambah sektor basis terhadap pendapatan

Untuk membedakan nilai dampak daerah (regional) dan propinsi maka diberikan tanda sebagai berikut:

β = Nilai dampak sektor basis terhadap perekonomian Kota Padang Panjang

β^* = nilai sektor basis terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat

Bila:

$\beta > \beta^*$ = kebijaksanaan pembangunan regional berhasil

$\beta < \beta^*$ = kebijaksanaan pembangunan regional tidak berhasil

Dalam penelitian ini, hanya membahas sektor-sektor basis sedangkan sektor non basis diabaikan saja.

3. Teknik Peramalan

Untuk memperkirakan perkembangan perekonomian Kota Padang Panjang melalui PDRB dan sektor/sub sektor digunakan mode sebagai berikut (Iqbal Hasan, 2003): *Trend Linier* Sederhana yaitu $v = a + bt$ dimana:

v = variabel ekonomi yang akan diestimasi

$a = \frac{\sum Y_i}{n}$ di mana, a adalah konstanta

(variabel ekonomi pada tahun nol)

$b = \frac{\sum tY_i}{\sum r^2}$ di mana, b adalah pertambahan rata-rata pertahun



Persamaan *trend linear* sederhana ini dipergunakan untuk memperkirakan perkembangan perekonomian per sektor pada tahun yang akan datang.

dengan menggunakan *Trend Linear* akan diperkirakan perkembangan perekonomian (PDRB) dan sektor-sektor basis perekonomian untuk beberapa tahun mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan empiris dimulai dari penentuan sektor-sektor basis perekonomian Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode LQ (*Location quotient*). Selanjutnya dengan membandingkan nilai dampak sektor basis perekonomian Padang Panjang dengan nilai dampak sektor perekonomian propinsi Sumatera Barat akan dievaluasi dampak kebijaksanaan pembangunan sektor basis terhadap perekonomian Kota Padang Panjang. Dan

1. Penentuan Sektor Basis

Location Quotient (LQ) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor perekonomian yang dapat dijadikan sektor basis yang pada akhirnya akan menunjang perekonomian Kota Padang Panjang. Suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor basis bagi perekonomian daerah apabila koefisien lokasi dari sektor tersebut besar dari satu ($LQ > 1$). Tabel.1 memperlihatkan nilai LQ untuk setiap sektor perekonomian Kota Padang Panjang selama periode 2002-2011.

Tabel.1
Hasil Perhitungan Nilai *Location Quotient* (LQ) Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 2002-2011

Lapangan usaha											Rata-	
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	rata	Ket
Pertanian	0,57	0,56	0,57	0,52	0,51	0,51	0,49	0,47	0,45	0,45	0,51	NB
Pertambangan	0,37	0,34	0,34	0,37	0,34	0,38	0,39	0,39	0,33	0,28	0,35	NB
Industri	0,81	0,84	0,82	0,81	0,81	0,75	0,76	0,76	0,78	0,78	0,79	NB
Listrik	3,11	3,06	2,67	2,49	2,23	2,18	2,10	2,09	2,19	2,13	2,43	B
Bangunan	1,24	1,20	1,16	1,69	1,26	1,36	1,37	1,39	1,40	1,41	1,35	B
Perdagangan	0,68	0,71	0,73	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,68	NB
Pengangkutan	1,81	1,75	1,72	1,85	1,72	1,71	1,72	1,67	1,63	1,61	1,72	B
Keuangan	1,68	1,71	1,72	1,85	1,69	1,74	1,75	1,82	1,87	1,89	1,77	B
Jasa-jasa	1,41	1,53	1,53	1,41	1,45	1,47	1,48	1,54	1,58	1,58	1,50	B

Sumber: Data diolah

Keterangan: B =Basis NB =NonBasis



Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa ada 5 sektor yang dapat dijadikan sektor basis bagi kota Padang Panjang yaitu sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Tabel 2 akan memperlihatkan sektor-sektor yang dapat dijadikan sektor basis perekonomian kota Padang Panjang selama periode analisis yaitu sektor yang memiliki $LQ > 1$

Pertumbuhan sektor basis Kota Padang Panjang pertahunnya hampir sama. Pada sektor listrik yang mengalami peningkatan hanya pada tahun awal yaitu tahun 2002 sebesar 3,11 dan pada tahun 2010 sebesar 2,19, tetapi pada tahun 2011 kembali turun sebesar 2,13. Untuk sektor bangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2005 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 1,69.

Untuk sektor pengangkutan pertumbuhannya dari tahun ketahun kurang stabil dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,67, tahun 2010 sebesar 1,63 dan terakhir pada tahun 2011 sebesar

1,61. Untuk sektor keuangan pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 1,69, sedangkan untuk sektor jasa-jasa dari tahun ke tahun pertumbuhannya stabil dan pada tahun 2005 turun sebesar 1,41.

2. Dampak Sektor Basis terhadap Perekonomian Kota Padang Panjang

Peran kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan di Kota Padang Panjang selama tahun 2002-2011 dapat dilihat dengan menguji dampak sektor-sektor basis atau yang berpotensi terhadap perekonomian secara makro. Dan juga dapat dilihat dari nilai dampak (pengganda) sektor basis terhadap total pendapatan yang diestimasi berdasarkan Model Basis Ekspor, sektor-sektor tersebut yaitu sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Pada penulisan ini yang lebih ditekankan adalah nilai koefisien sektor atau nilai dampak sektor basis yang diuji daripada nilai

Tabel.2
Sektor-sektor Basis Perekonomian Kota Padang Panjang Periode 2002-2011

Lapangan usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Listrik	3,11	3,06	2,67	2,49	2,23	2,18	2,10	2,09	2,19	2,13	2,43
Bangunan	1,24	1,20	1,16	1,69	1,26	1,36	1,37	1,39	1,40	1,41	1,35
Pengangkutan	1,81	1,75	1,72	1,85	1,72	1,71	1,72	1,67	1,63	1,61	1,72
Keuangan	1,68	1,71	1,72	1,85	1,69	1,74	1,75	1,82	1,87	1,89	1,77
Jasa-jasa	1,41	1,53	1,53	1,41	1,45	1,47	1,48	1,54	1,58	1,58	1,50

Sumber : Data diolah



koefisien determinasi (R^2) yang memperlihatkan seberapa besar variabel independent mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependent. Apabila koefisien determinasi rendah dalam satu penelitian tidak berarti bahwa penelitian tersebut buruk jika menguji hipotesa dari teori ekonomi.

Persamaan 9 pada metodologi penelitian secara teoritis menghubungkan nilai dampak sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa dengan pendapatan daerah yang positif. Yang berarti bahwa jika terjadi

peningkatan nilai tambah dari suatu sektor akan meningkatkan total pendapatan daerah tersebut. Tetapi seberapa besar dampak dari peningkatan nilai tambah dari suatu sektor terhadap total pendapatan dari suatu daerah secara empiris dapat dijelaskan oleh nilai dampak yang didapat dari koefisien sektor yang diuji.

Berdasarkan persamaan di atas dapat diperoleh hasil perhitungan dampak sektor basis terhadap perekonomian Kota Padang Panjang dengan menggunakan data PDRB Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat berdasarkan harga konstan 2000.

Tabel.3
Hasil Regresi Antara Pendapatan Dengan Sektor-sektor Basis di Kota Padang Panjang Periode 2002-2011

Sektor Basis	Persamaan Regresi	R^2	t_{hitung}
Listrik	$Y_l = 177391,82 + 15,540 x$	0,854	6,838
	$Y_l^* = 19170610 + 23,001 x^*$	0,754	4,957
Bangunan	$Y_b = 245564,09 + 0,320 x$	0,001	0,082
	$Y_b^* = 25533837 - 1,388 x^*$	0,025	-0,455
Pengangkutan	$Y_p = 41121,804 + 4,287 x$	0,965	14,799
	$Y_p^* = 9530216,8 + 5,236 x^*$	0,955	13,078
Keuangan	$Y_k = 57895,075 + 8,015 x$	0,502	2,840
	$Y_k^* = 14226710 + 7,339 x^*$	0,114	1,016
Jasa	$Y_j = 81662,108 + 2,648 x$	0,937	10,910
	$Y_j^* = 13720181 + 2,537 x^*$	0,523	2,961

Sumber: Data diolah

dimana:

Y = Merupakan hasil regresi kota Padang Panjang

Y* = Merupakan hasil regresi Sumatera Barat

x/x*/b = Merupakan sektor basis

Dari hasil regresi di atas dapat kita lihat bahwa sektor listrik baik di Padang Panjang maupun Sumatera Barat mempunyai konstanta yang positif, artinya bahwa tanpa ada sektor listrik tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan pada daerah ini, dimana nilainya sebesar Rp. 177.391,82, sedangkan untuk propinsi sebesar Rp. 19.170.610 hal ini berarti tanpa ada sektor listrik di tingkat propinsi akan menurunkan pendapatan propinsi sebesar Rp.19.170.610

Untuk sektor bangunan juga mempunyai konstanta yang positif baik di Padang Panjang maupun di Sumatera Barat, dimana nilainya sebesar Rp.245.564,09 yang berarti bahwa tanpa ada sektor bangunan tidak akan menurunkan pendapatan Padang Panjang sebesar Rp.245.564,09 sedangkan untuk propinsi sebesar Rp.25.533.837 hal ini berarti bahwa tanpa ada sektor bangunan tidak akan menurunkan pendapatan Sumatera Barat sebesar Rp.25.533.837

Pada sektor pengangkutan juga mempunyai konstanta yang positif, baik di Padang Panjang maupun di Sumatera Barat, dimana nilainya sebesar Rp.41.121,804 yang berarti bahwa tanpa ada sektor pengangkutan tidak akan menurunkan pendapatan Padang Panjang sebesar Rp.41.121,804, sedangkan untuk propinsi sebesar Rp.9.530.216,8. Hal ini berarti bahwa tanpa ada sektor pengangkutan tidak akan menurunkan pendapatan Sumatera Barat sebesar Rp.9.530.216,8

Sektor keuangan dari hasil regresi juga mempunyai konstanta yang positif, artinya bahwa tanpa ada sektor keuangan tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan

Padang Panjang, dimana nilainya sebesar Rp.57.895,075. Sedangkan untuk propinsi sebesar Rp.14.226.710 hal ini berarti tanpa ada sektor keuangan ditingkat propinsi tidak akan menurunkan pendapatan propinsi sebesar Rp.14.226.710.

Terakhir, sektor jasa-jasa, dari hasil regresi mempunyai konstanta yang positif baik di Padang Panjang maupun Sumatera Barat, dimana nilainya sebesar Rp.81.662,108 yang berarti bahwa tanpa ada sektor jasa-jasa tidak akan menurunkan pendapatan Padang Panjang sebesar Rp.81.662,108. Sedangkan untuk propinsi sebesar Rp.13.720.181 hal ini berarti bahwa tanpa ada sektor jasa-jasa tidak akan menurunkan pendapatan Sumatera Barat sebesar Rp.13.720.181.

Dari hasil regresi dari Tabel.3 juga dapat dievaluasi kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang khususnya untuk sektor basis. Evaluasi kebijaksanaan dilakukan dengan membandingkan nilai dampak dari suatu sektor di region dengan nilai dampak sektor yang sama di tingkat propinsi. Kebijakan pembangunan suatu sektor disuatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila nilai dampak sektor suatu region (β) lebih besar jika dibandingkan dengan nilai dampak sektor yang sama di tingkat propinsi (β^*) atau ($\beta > \beta^*$). Hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel.4.

Dari hasil perhitungan estimasi di atas menunjukkan bahwa nilai dampak sektor listrik perekonomian Kota Padang Panjang lebih kecil dari nilai dampak sektor Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa





Tabel.4
Hasil Estimasi Nilai Dampak Sektor Basis Kota Padang Panjang (β) dengan Sumatera Barat (β^*)

Sektor Basis	Padang Panjang	Sumatera Barat	Evaluasi
Listrik	15,540	23,001	$\beta < \beta^*$
Bangunan	0,320	-1,388	$\beta > \beta^*$
Pengangkutan	4,287	5,236	$\beta < \beta^*$
Keuangan	8,015	7,339	$\beta > \beta^*$
Jasa	2,648	2,537	$\beta > \beta^*$

Sumber : Data diolah

kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang belum berhasil. Jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 hanya mampu meningkatkan PDRB Kota Padang Panjang sebesar Rp15.540.000 sedangkan di tingkat Sumatera Barat jika terjadi peningkatan nilai tambah sektor listrik akan mampu meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp23.001.000.

Sedangkan hasil estimasi yang ditunjukkan oleh sektor bangunan menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang sudah berhasil dalam mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan karena besarnya nilai dampak sektor bangunan bila dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat. Jika terjadi kenaikan nilai tambah sebesar Rp1.000.000 akan meningkatkan PDRB Padang Panjang sebesar Rp320.000, sedangkan di tingkat Sumatera Barat jika terjadi peningkatan nilai tambah sebesar Rp1.000.000 akan

menurunkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp1.388.000. Hal tersebut terjadi karena kemampuan produktivitas sektor bangunan tidak mampu menaikkan PDRB Sumatera Barat. Salah satu penyebabnya yaitu lokasi yang kurang tepat dan perencanaan dari sektor tersebut kurang mantap.

Nilai dampak sektor pengangkutan Padang Panjang juga lebih kecil dari nilai dampak sektor yang sama di Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah Padang Panjang juga belum berhasil. Jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 hanya mampu meningkatkan PDRB Kota Padang Panjang sebesar Rp4.287.000, sedangkan di tingkat Sumatera Barat jika terjadi peningkatan nilai tambah sektor pengangkutan akan mampu meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp5.236.000.

Pada sektor keuangan menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang diambil oleh

pemerintah Kota Padang Panjang sudah berhasil dalam mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan karena nilai dampak dari sektor kota Padang Panjang lebih besar dari nilai dampak sektor Sumatera Barat. Jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 akan menaikkan PDRB sebesar Rp8.015.000, sedangkan di tingkat Sumatera Barat jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 maka akan meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp7.339.000

Nilai dampak sektor jasa menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sudah berhasil. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai dampak sektor jasa dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat. Jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 akan meningkatkan PDRB Kota Padang Panjang sebesar Rp. 2.648.000, sedangkan di tingkat Sumatera Barat jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 maka akan meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp. 2.537.000.

3. Proyeksi Perkembangan Perekonomian Sektor-sektor Basis Kota Padang Panjang

Berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan *trend linier*, maka dapat diperkirakan perkembangan perekonomian Kota Padang Panjang baik perkembangan PDRB maupun perkembangan sektor-sektor basisnya. Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada Tabel.1 dapat diketahui ada lima sektor yang dapat dijadikan sektor basis perekonomian Kota Padang Panjang yaitu, sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa.

Dari persamaan perkembangan perekonomian PDRB dapat dilihat perkembangan PDRB dan perkembangan sektor-sektor basis yang pada akhirnya dapat diproyeksikan perkembangan perekonomian Kota Padang Panjang. Besar kecilnya perkembangan perekonomian dan sektor-sektor basis dapat dilihat dari koefisien trendnya, karena koefisien inilah

Tabel.5
Persamaan Perkiraan Perkembangan Perekonomian
Sektor-sektor Basis Kota Padang Panjang

No	Sektor	Persamaan
1	Listrik	$Y_l = 4.783,10 + 237,92t$
2	Bangunan	$Y_b = 19.256,07 - 113,46t$
3	Pengangkutan	$Y_p = 49.126,66 + 894,47t$
4	Keuangan	$Y_k = 24.182,20 + 174,39t$
5	Jasa-Jasa	$Y_j = 64.220,86 + 1450,66t$
6	PDRB	$Y = 251.723,83 + 3752,60t$

Sumber : Data diolah



yang menunjukkan besarnya pertambahan sektor-sektor tersebut pertahunnya. Persamaan perkembangan perekonomian yang meliputi PDRB dan sektor-sektor basis dapat dilihat pada Tabel.5.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata pertahun yang paling besar adalah sektor jasa-jasa, diikuti oleh sektor pengangkutan, sektor keuangan, sektor bangunan dan kemudian sektor listrik. Perkiraan perkembangan perekonomian dan perkembangan sektor-sektor basis Kota Padang Panjang dapat dilihat dari Tabel.6 berikut.

diperkirakan naik sebesar Rp16.441,18 pada tahun 2031. Sektor bangunan diperkirakan pada tahun 2016 sebesar Rp17.100,33 diperkirakan naik pada tahun 2031 menjadi Rp13.696,53. Sektor pengangkutan pada tahun 2016 sebesar Rp66.121,59 dan diperkirakan berkembang pada tahun 2031 sebesar Rp92.955,69. Sektor keuangan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp27.495,61 dan diperkirakan naik pada tahun 2031 sebesar Rp32.725,31 dan yang terakhir sektor jasa-jasa dengan perkiraan tahun 2016 sebesar Rp91.783,40 dan

Tabel.6
Perkiraan Perkembangan Perekonomian Per-Sektor
Kota Padang Panjang Tahun 2016-2031 (Juta Rp)

No	Sektor	2016	2021	2026	2031
1	Listrik	9.303,58	11.682,78	14.061,98	16.441,18
2	Bangunan	17.100,33	15.965,73	14.831,13	13.696,53
3	Pengangkutan	66.121,5 9	75.066,29	84.010,99	92.955,69
4	Keuangan	27.495,61	29.239,51	30.983,41	32.725,31
5	Jasa-Jasa	91.783,40	106.290,00	120.796,60	135.303,20
6	PDRB	323.023,23	360.549,23	398.075,23	435.601,23

Sumber: Data diolah

Dari Tabel.6 di atas dapat dilihat proyeksi perkembangan perekonomian baik PDRB maupun perkembangan sektor-sektor basis perekonomian Padang Panjang untuk tahun 2016, 2021, 2026 dan 2031. Perkembangan PDRB Kota Padang Panjang diperkirakan pada tahun 2016 sebesar Rp323.023,23 diperkirakan naik pada tahun 2031 menjadi Rp435.601,23.

Sektor listrik diperkirakan pada tahun 2016 sebesar Rp9.303,58 dan

diperkirakan naik sebesar Rp135.303,20 pada tahun 2031.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Simpulan

Secara umum, hasil estimasi dengan melihat nilai dampak sektor basis Kota Padang Panjang, yaitu sektor listrik dan sektor pengangkutan, jika dibandingkan

dengan nilai dampak sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum optimal, karena nilai dampak dari semua sektor basis di Kota Padang Panjang lebih kecil daripada nilai dampak sektor yang sama pada tingkat Sumatera Barat. Kecilnya nilai dampak ini disebabkan karena sebagian besar hasil produksi dari sektor basis hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, yang berakibat kecilnya pendapatan yang masuk ke daerah ini.

Sektor yang mempunyai nilai dampak lebih besar jika dibandingkan dengan nilai dampak sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat, adalah sektor bangunan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah berhasil. Besarnya nilai dampak ini disebabkan karena hasil produksi dari sektor ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Dari pengujian empiris tentang perkembangan perekonomian dan sektor basis dengan menggunakan *Trend Linear* dilihat bahwa semua sektor basis termasuk pada sektor yang berkembang cepat karena memiliki *Trend Linear* besar dari 1000 per-tahun.

Implikasi Kebijakan

Perekonomian Kota Padang Panjang perlu lebih dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pengambilan kebijaksanaan pemerintah Daerah Padang

Panjang sebaiknya lebih mengembangkan sektor basis karena sektor ini merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah juga harus mengembangkan sektor non basis dalam kebijaksanaan pembangunan. Sektor basis dan non basis harus dikembangkan secara bersamaan karena sektor basis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sektor non basis berkaitan dengan ketahanan lokal.

Agar pembangunan Daerah Padang Panjang berhasil dengan baik, maka kebijaksanaan yang diambil pemerintah daerah harus terkait dengan kebijaksanaan yang diambil di tingkat propinsi maupun nasional. Dalam pengembangan perekonomian diperlukan sebuah kerangka kebijaksanaan yang terarah dan terpadu. Keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan hasil yang sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln., 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Anonymous., 2002-2011, *Sumatera Barat Dalam Angka*, BPS Sumatera Barat.
- ., 2002-2011, *Kota Padang Panjang Dalam Angka*, BPS Kota Padang Panjang.

- Deddy Supriady B dan Dadang S., 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Eva Susana., 2000, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Pendekatan Basis Ekspor*, Studi Kasus Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta (tidak dipublikasikan).
- Michael P Todaro., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, Erlangga, Jakarta.
- M Iqbal Hasan., 2003, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maiza Oktolinda., 2004. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Pendekatan Basis Ekspor*. Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, (tidak dipublikasikan).
- Richardson. H.W., 1978, *Regional and Urban Economics*, Penguin Books, London.
- Rustian Kamaluddin., 1991, *Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Daerah*, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Raksaka Mahi., 2000, *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*, Analisis CISS.
- Ratna Sri Wisyastuti., 2003, *Peran Pembangunan Ekonomi Bangka Barat terhadap Daerah di Luar Pulau Bangka*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, (tidak dipublikasikan).
- Robinson Tarigan., 2004, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafrizal, 1988, *Memelihara Momentum Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Syafrizal., 2000, *Teori Ekonomi Regional (Diklat)*, FE Universitas Andalas, Padang.
- Syahroni., 2002, *Pengertian Dasar dan Genetik tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Makalah)*, Jakarta.
- Tulus Tambunan., 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

